

The Principles of Islamic Leadership in Buya Hamka's Thought: Relevance to Contemporary Managerial Ethics in Aceh

¹**M. Husni Mubaraq**

STAI Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia

mh.mubaraq@gmail.com

Abstract

In the practice of ideal leadership, the values of ethics, spirituality, and social responsibility should serve as the fundamental basis for decision-making and organizational management. However, modern managerial dynamics are often trapped in pragmatic secularism and moral relativism, which weaken the ethical dimension of leadership. This article aims to explore the principles of Islamic leadership in Buya Hamka's thought and examine their relevance to contemporary managerial ethics. This study employs a qualitative approach with a descriptive method through library research, analyzing Buya Hamka's works and recent scholarly references thematically and contextually. The findings reveal that Buya Hamka's ideas make a significant contribution to developing a moral, spiritual, and humanistic leadership paradigm. These principles can serve as a normative foundation for shaping an ethical management model relevant to the challenges of modern organizations, including those in Aceh.

Keywords: Islamic Leadership, Buya Hamka, Managerial Ethics

Abstrak

Dalam praktik kepemimpinan ideal, nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial seharusnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Namun, dinamika manajerial modern justru sering kali terjebak dalam sekularisme pragmatis dan relativisme moral, yang melemahkan dimensi etik dalam kepemimpinan. Artikel ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dalam pemikiran Buya Hamka serta menelaah relevansinya terhadap etika manajerial kontemporer. Penelitian ini tergolong dalam studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui metode studi pustaka, yang menganalisis karya-karya Buya Hamka serta referensi ilmiah terkini secara tematik dan kontekstual. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran Buya Hamka berkontribusi signifikan dalam membangun paradigma kepemimpinan yang bermoral, spiritual, dan manusiawi. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi fondasi normatif dalam

¹ Corresponding Author

membentuk model manajemen etis yang relevan dengan tantangan organisasi masa kini termasuk di Aceh.

Kata Kunci: Kepemimpinan Islami, Buya Hamka, Etika Manajerial

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam struktur sosial yang mempengaruhi arah dan keberlangsungan suatu komunitas atau organisasi (Checharia & Pujiyanto, 2024). Dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai posisi strategis, tetapi juga sebagai amanah yang sarat dengan tanggung jawab moral dan spiritual (Fazillah, 2023). Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara pencapaian tujuan duniawi dan komitmen terhadap nilai-nilai ilahiah. Oleh karena itu, kepemimpinan Islami menuntut integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat.

Buya Hamka, seorang ulama dan intelektual muslim terkemuka di Indonesia, telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami. Dalam karya-karyanya, Hamka menekankan pentingnya akhlak, spiritualitas, dan moral sebagai landasan utama bagi seorang pemimpin (Susanti et al., 2024). Ia percaya bahwa kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada keteladanan dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang universal. Pemikiran Hamka ini relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks etika manajerial kontemporer.

Dalam dunia manajemen modern, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritualitas ke dalam praktik kepemimpinan. Pendekatan yang hanya berfokus pada efisiensi dan produktivitas seringkali mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan. Pemikiran Buya Hamka dapat menjadi alternatif paradigma yang menyeimbangkan antara pencapaian organisasi dan tanggung jawab sosial. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, organisasi dituntut untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai moral (Arifin & Takrim, 2021). Pemikiran Buya Hamka menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik kepemimpinan, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara berkelanjutan dan beretika.

Dalam praktiknya, banyak organisasi yang masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan spiritualitas dalam kepemimpinan. Faktor-faktor seperti tekanan pasar, persaingan bisnis, dan budaya kerja yang materialistik seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan Islami yang digagas oleh Buya Hamka dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks manajerial saat ini. Isu-isu seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif menjadi semakin relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis kritis terhadap pemikiran Hamka dan relevansinya dalam praktik manajemen kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dalam pemikiran Buya Hamka dan menganalisis relevansinya terhadap etika manajerial kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek spiritualitas, akhlak, moral, dalam kebijakan sosial yang menjadi elemen kunci dalam konsep kepemimpinan Hamka. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan model kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi modern.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu kepemimpinan Islami serta praktik manajerial yang beretika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi para pemimpin organisasi dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan mereka. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penelitian ini juga dapat mendorong refleksi kritis dan dialog konstruktif mengenai pentingnya nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dan manajemen. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Buya Hamka, diharapkan para pemimpin dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tinjauan Pustaka

Studi tentang kepemimpinan dalam pemikiran Buya Hamka telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Secara umum, kajian-kajian tersebut mengupas pandangan Buya Hamka mengenai kepemimpinan dan kekuasaan politik dari perspektif Islam, dengan fokus pada nilai-nilai seperti ketakwaan, keadilan, etika, pelayanan, dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan amanah kepemimpinan. Salah satunya adalah penelitian yang menyoroti pandangan Hamka mengenai kekuasaan politik sebagai amanah dari Allah yang harus dilaksanakan untuk kebaikan umat (Zona, 2024). Penelitian lainnya membahas secara menyeluruh falsafah kepemimpinan Hamka, baik dari sisi spiritual maupun sosial (Susanti et al., 2024). Selain itu, ada juga penelitian yang mengkaji tafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam Tafsir Al-Azhar sebagai dasar dari konsep kepemimpinan ideal (Srikandi et al., 2021).

Sekalipun ketiga tulisan di atas telah membahas secara komprehensif tentang pemikiran Buya Hamka mengenai kepemimpinan dan kekuasaan politik dalam perspektif Islam, namun ketiga tulisan tersebut tidak membahas bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan Islami yang diajukan oleh Hamka dapat dihubungkan langsung dengan praktik etika manajerial di konteks dunia kerja dan kepemimpinan kontemporer. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena fokus

pada relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Hamka dalam menghadapi tantangan manajerial masa kini, menghubungkan nilai-nilai etika Islam yang diajukan oleh Hamka dengan praktik kepemimpinan yang lebih aplikatif di dunia modern. Pendekatan ini membuka peluang untuk memadukan warisan pemikiran Islam dengan kebutuhan manajerial saat ini, sehingga penelitian ini lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika kepemimpinan di era globalisasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dalam pemikiran Buya Hamka serta menelusuri relevansinya dengan etika manajerial kontemporer. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan eksplorasi sistematis terhadap karya-karya primer dan sekunder yang membahas pemikiran Buya Hamka, khususnya dalam konteks filsafat, kepemimpinan, dan manajemen Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian kritis terhadap berbagai dokumen, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isinya sesuai fokus penelitian.

Peneliti menelusuri sumber-sumber ilmiah terkini dan terpercaya guna memperkuat analisis terhadap tantangan etika manajerial masa kini. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan dan merumuskan elemen-elemen kunci dalam pemikiran kepemimpinan Buya Hamka. Tahapan analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Prosedur ini dilakukan secara induktif, dengan menafsirkan makna dari data kualitatif berdasarkan pola dan tema yang muncul dari narasi-narasi dalam teks. Peneliti mengedepankan interpretasi kontekstual agar pemikiran Buya Hamka tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara aplikatif dalam konteks kepemimpinan masa kini.

Konseptualisasi Kepemimpinan dalam Islam dan Etika Manajerial

Kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep yang menyeluruh, tidak terbatas pada aspek administratif saja, tetapi juga meliputi dimensi spiritual dan moral. Istilah seperti *al-imamah* dan *al-qiyadah* menggambarkan tanggung jawab besar seorang pemimpin dalam membawa amanah dari Allah dan umat (Ahmad, 2016). Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan atau kekuasaan, tetapi sebuah beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas. Amanah ini menuntut pertanggungjawaban di dunia dan akhirat (Sukatin et al., 2022). Kepemimpinan dipandang sebagai tugas suci yang tidak bisa dijalankan sembarangan. Nilai-nilai keagamaan menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi kepemimpinan ini. Hal ini menjadikan pemimpin sebagai panutan moral bagi masyarakat.

Prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam berakar dari ajaran al-Qur'an dan hadits, serta diperkuat oleh pemikiran para ulama klasik. Nilai-nilai seperti *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), *syura* (musyawarah), *istiqamah*

(konsistensi), dan *ikhlas* (ketulusan) menjadi pedoman utama. Al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya keadilan dan ketulusan sebagai fondasi moral dalam memimpin (Yugo & Surana, 2024). Pemimpin dituntut tidak hanya cakap dalam mengelola organisasi, tetapi juga mampu menjaga integritas spiritual. Dalam pandangan Islam, moralitas dan profesionalitas harus berjalan seiring. Keseimbangan ini menjadi ciri khas kepemimpinan Islami yang membedakannya dari konsep kepemimpinan sekuler.

Dalam manajemen modern, etika manajerial atau *ethical governance* menjadi isu penting dalam menjalankan organisasi secara bertanggung jawab (Zhu et al., 2024). Prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas sangat ditekankan untuk memastikan keputusan yang etis dan berdampak sosial positif. Etika manajerial juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Praktik bisnis tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral. Dengan etika manajerial, sebuah organisasi diharapkan menjadi aktor sosial yang bertanggung jawab. Konsep ini memberi ruang bagi nilai-nilai universal dalam praktik organisasi.

Beberapa teori kepemimpinan modern menunjukkan pentingnya dimensi etika dalam memimpin organisasi. *Transformational leadership* menekankan inspirasi dan motivasi dalam menciptakan perubahan positif (Kim & Cruz, 2022). *Servant leadership* mengutamakan pelayanan kepada orang lain sebagai inti dari kepemimpinan (Schmidt & Dailey, 2024). Sedangkan *authentic leadership* menekankan pentingnya keaslian dan transparansi dalam tindakan pemimpin (Jiewen et al., 2024). Ketiga pendekatan ini menyoroti aspek moral yang serupa dengan nilai-nilai Islam. Mereka bertujuan membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat antara pemimpin dan pengikut. Oleh karena itu, etika menjadi jantung dari kepemimpinan yang efektif.

Tantangan etika dalam manajemen modern semakin kompleks karena tekanan keuntungan jangka pendek, globalisasi, dan keragaman budaya. Meskipun demikian, banyak penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mengedepankan etika justru menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hubungan dengan pemangku kepentingan juga cenderung lebih kuat dan berkelanjutan. Kepemimpinan etis terbukti menjadi keunggulan strategis dalam jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa integritas bukan hanya nilai moral, tetapi juga aset organisasi. Pemimpin etis menjadi figur penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Prinsip kepemimpinan Islami memiliki kesamaan yang kuat dengan etika manajerial kontemporer. Keduanya menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini tidak hanya berdampak secara spiritual, tetapi juga praktis dalam dunia bisnis dan organisasi. Kesamaan tersebut membuka ruang dialog antara ajaran agama dan praktik manajerial modern. Kepemimpinan Islami dan etika kontemporer dapat saling melengkapi dalam membentuk kepemimpinan yang unggul. Hal ini memperkaya pendekatan kepemimpinan dalam konteks global.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kepemimpinan Islami dan etika manajerial modern, terutama dalam hal sumber moralitas. Kepemimpinan Islami bersumber dari wahyu ilahi dan ajaran agama, yang menjadikan spiritualitas sebagai landasan utama. Sementara itu, etika manajerial kontemporer

lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial dan filsafat humanistik. Orientasi spiritual dalam Islam menekankan pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan hanya kepada masyarakat. Ini menjadikan kepemimpinan Islami lebih mendalam dalam dimensi moral. Perbedaan ini bukan penghalang, melainkan peluang integrasi yang saling menguatkan.

Integrasi antara prinsip kepemimpinan Islami dan etika manajerial memberikan kerangka yang lebih menyeluruh dalam menghadapi tantangan kepemimpinan. Pendekatan ini memungkinkan pemimpin menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan keterampilan manajerial yang efektif. Kombinasi ini sangat relevan di era modern yang sarat kompleksitas. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, pemimpin dapat lebih adaptif dan bijak dalam membuat keputusan. Hal ini juga memperkuat legitimasi moral dan profesional pemimpin. Integrasi ini menjembatani dunia spiritual dan dunia kerja secara harmonis.

Penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dalam organisasi masa kini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Selain itu, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial memperkuat reputasi organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, nilai-nilai tersebut menjadi aset strategis. Kepemimpinan berbasis etika memberikan rasa aman dan inspirasi bagi anggota organisasi. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Keunggulan moral menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia profesional.

Efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan teknis dan strategi bisnis, tetapi juga oleh integritas dan komitmen terhadap etika. Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral lebih mampu bertahan dalam situasi sulit dan perubahan cepat (Usanto et al., 2023). Kepemimpinan yang berlandaskan etika akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini juga menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun organisasi yang tangguh. Maka, kepemimpinan bermoral menjadi kebutuhan zaman.

Untuk menyiapkan pemimpin masa depan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan perlu menekankan pentingnya etika dan moralitas. Kurikulum yang kaya akan nilai-nilai ini akan membantu calon pemimpin memahami peran mereka secara holistik. Mereka akan menyadari bahwa tanggung jawab tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat. Pembentukan karakter melalui pendidikan menjadi investasi jangka panjang. Dengan bekal ini, mereka dapat memimpin dengan integritas dan visi yang kuat. Pendidikan etis menjadi dasar lahirnya pemimpin berkualitas.

Organisasi juga dapat mendukung praktik kepemimpinan etis dengan menerapkan kebijakan yang sesuai. Misalnya melalui penyusunan kode etik, pelatihan etika rutin, dan sistem pelaporan pelanggaran. Langkah-langkah ini menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas. Ketika etika dijadikan prioritas, lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan inklusif. Ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi. Kepemimpinan etis tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya yang melekat dalam operasional sehari-hari.

Dalam dunia yang semakin global dan beragam, pemimpin dituntut memiliki kepekaan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan kepemimpinan harus disesuaikan dengan konteks budaya yang berbeda agar prinsip etika dapat

diterapkan secara efektif. Keberhasilan dalam memimpin di berbagai latar belakang budaya sangat bergantung pada fleksibilitas moral pemimpin. Ini menuntut pemimpin untuk terbuka, mendengar, dan belajar dari keragaman. Sensitivitas budaya menjadi bagian penting dalam menjalankan kepemimpinan yang inklusif dan beretika. Hal ini menjadikan kepemimpinan lebih relevan di panggung global.

Pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan (*servant leadership*) dan keaslian (*authentic leadership*) terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan umat dan panutan moral. Pelayanan dan kejujuran bukan hanya aspek emosional, tetapi strategi yang berdampak nyata. Ketulusan dan kepercayaan menjadi kekuatan utama kepemimpinan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemimpin dan anggota organisasi. Sehingga, kepemimpinan etis menjadi penopang keberhasilan jangka panjang.

Integrasi antara kepemimpinan Islami dan etika manajerial kontemporer berpotensi menciptakan organisasi yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berdampak sosial positif. Pendekatan ini menyatukan nilai-nilai spiritual dengan praktik bisnis yang berkelanjutan. Sinergi ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan kepemimpinan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Kepemimpinan berbasis nilai menjadikan organisasi lebih humanis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat memperkuat praktik manajerial modern. Integrasi ini menjadi strategi yang menjanjikan di era transformasi global.

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islami dan etika manajerial kontemporer merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan kepemimpinan modern. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memperkuat integritas dan tanggung jawab sosial pemimpin. Pemimpin yang beretika lebih siap menghadapi kompleksitas zaman. Keselarasan antara nilai spiritual dan profesional menciptakan kepemimpinan yang utuh. Ini menjadi kunci sukses bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang di masa depan. Kepemimpinan etis adalah kebutuhan mendesak dalam dunia yang terus berubah.

Pemikiran Buya Hamka tentang Kepemimpinan Islami

Biografi intelektual Buya Hamka mencerminkan perjalanan panjang seorang ulama yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Lahir dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatra Barat, Hamka dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat menghargai ilmu dan agama (Salsabilla et al., 2024). Ayahnya, Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama terkemuka, sementara ibunya berasal dari keluarga seniman, yang mempengaruhi minat Hamka terhadap sastra dan budaya (Thamrin et al., 2024). Sejak muda, Hamka menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama, yang membawanya menjadi salah satu ulama besar di Nusantara.

Dalam dunia keilmuan, Buya Hamka dikenal sebagai seorang mufassir, sastrawan, dan pemikir Islam yang produktif. Salah satu karya monumental beliau adalah *Tafsir Al-Azhar*, sebuah tafsir al-Qur'an yang ditulis dengan pendekatan sosial-kemasyarakatan. Karya ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Selain itu, Hamka juga menulis berbagai karya sastra seperti *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, yang tidak hanya populer di kalangan pembaca, tetapi juga mengandung nilai-nilai dakwah yang mendalam.

Sebagai seorang ulama, Buya Hamka memiliki pandangan yang jelas tentang kepemimpinan dalam Islam. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, beliau menekankan bahwa pemimpin dalam Islam bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat. Hamka mengutip QS. Al-Baqarah ayat 30 yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar terhadap umatnya. Menurut Hamka, pemimpin harus mampu menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat (Hamka, n.d.).

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pandangan Buya Hamka sangat menekankan pada aspek moral dan spiritual. Beliau percaya bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada akhlak yang mulia, seperti yang diajarkan dalam konsep uswah hasanah. Pemimpin harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selain itu, tanggung jawab dan amanah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pemimpin. Hamka menekankan bahwa pemimpin harus menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah yang diberi amanah untuk memimpin umat, dan karenanya harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (Susanti et al., 2024).

Kebijaksanaan (hikmah) dan keadilan sosial juga menjadi prinsip penting dalam kepemimpinan menurut Buya Hamka. Beliau mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana, dengan mempertimbangkan maslahat umat secara keseluruhan. Keputusan yang diambil harus adil dan tidak memihak, serta memperhatikan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hamka mengutip QS. An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap urusan (Hamka, n.d.). Keberanian moral dan independensi berpikir juga menjadi ciri khas kepemimpinan Buya Hamka. Beliau tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, meskipun harus menghadapi tantangan dan risiko. Hamka menunjukkan keberanian moralnya ketika menulis *Tafsir Al-Azhar*, yang sebagian besar ditulis saat beliau mendekam dalam penjara sebagai tahanan politik. Meskipun dalam kondisi yang sulit, beliau tetap konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, serta tidak gentar dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya (Ansari & Alzamzami, 2022).

Kepemimpinan Buya Hamka tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi dakwah dan pengabdian kepada umat. Beliau memandang kepemimpinan sebagai sarana untuk menebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Melalui kepemimpinan, Hamka berusaha membimbing umat agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter umat, karena dengan pendidikan yang baik, umat dapat memahami ajaran Islam secara benar dan menyeluruh. Dalam praktik dakwahnya, Buya Hamka menunjukkan bahwa kepemimpinan harus berbasis pada nilai-nilai ruhaniah. Beliau mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk karakter dan moral umat. Dakwah harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan kekerasan atau paksaan. Hamka menekankan pentingnya pendekatan yang lembut dan bijaksana dalam menyampaikan pesan dakwah, agar diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kepemimpinan Buya Hamka juga terlihat dalam peranannya dalam organisasi Muhammadiyah. Sebagai salah satu tokoh penting dalam organisasi tersebut, beliau berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui Muhammadiyah, Hamka berusaha mewujudkan visi dan misinya dalam membangun umat yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan politik, dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum (Kamal & Mulyana, 2019). Selain itu, Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang penulis produktif yang menggunakan karya-karyanya sebagai media dakwah. Melalui novel-novelnya, beliau menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual yang mendalam. Karya-karya seperti *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah* tidak hanya populer di kalangan pembaca, tetapi juga mengandung nilai-nilai dakwah yang dapat membimbing umat dalam menjalani kehidupan.

Dalam bidang pendidikan, Buya Hamka mendirikan Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran, Jakarta, yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Melalui masjid ini, beliau mengembangkan berbagai program pendidikan, seperti kuliah subuh, pengajian malam, dan kajian tasawuf, yang bertujuan untuk membentuk umat yang berilmu dan berakhlak mulia (Prabowo et al., 2025). Masjid Agung Al-Azhar juga menjadi simbol perjuangan beliau dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Warisan pemikiran Buya Hamka tetap relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang beliau ajarkan, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keberanahan moral, dapat menjadi pedoman bagi pemimpin masa kini dalam menghadapi tantangan zaman.

Selain itu, pendekatan dakwah beliau yang berbasis pada nilai-nilai ruhaniah dan kasih sayang dapat menjadi model bagi dakwah yang damai dan konstruktif. Dengan demikian, pemikiran dan perjuangan Buya Hamka terus memberikan inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Buya Hamka merupakan sosok ulama yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia. Melalui karya-karyanya, beliau menyampaikan pesan-pesan dakwah yang mendalam dan relevan dengan konteks zaman. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang beliau ajarkan dapat menjadi pedoman bagi pemimpin masa kini dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berakhlak mulia.

Relevansi Pemikiran Buya Hamka terhadap Etika Manajerial Kontemporer

Pemikiran Buya Hamka mengenai etika manajerial kontemporer menawarkan perspektif yang kaya dan relevan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di era modern. Sebagai seorang ulama, sastrawan, dan pemikir, Hamka menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diadaptasi dalam konteks manajerial. Beliau menyajikan konstruksi pemikiran mengenai etika yang terus dikaji oleh banyak peneliti dari berbagai bidang keilmuan hingga saat ini. Dalam konteks kepemimpinan, Hamka menekankan pentingnya akhlak dan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Menurutnya, etika merupakan kajian yang membahas baik dan buruk perbuatan manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia manajerial (Maulan et al., 2021). Hal ini sejalan dengan konsep servant leadership yang dikembangkan oleh Robert K. Greenleaf, yang menekankan bahwa pemimpin harus memiliki keinginan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan orang lain sebagai prioritas utama (Gera et al., 2024).

Selain itu, Hamka juga menekankan pentingnya pendidikan akhlak dalam membentuk karakter individu. Dalam pandangannya, pendidikan akhlak tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk watak dan budi pekerti yang baik, sehingga individu mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Konsep ini sejalan dengan teori *transformational leadership* yang dikemukakan oleh Bernard Bass, yang menekankan pentingnya pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pembentukan karakter dan nilai-nilai moral (VikaSari et al., 2023). Dalam konteks organisasi modern, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Hamka dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, dan organisasi sosial. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, penerapan nilai-nilai akhlak dapat membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Dalam pemerintahan, integritas dan kejujuran sebagai bagian dari etika Hamka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Begitu pula dalam organisasi sosial, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program-program yang dijalankan.

Integrasi pemikiran Hamka dalam dunia manajerial bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah sekularisme dan relativisme moral yang berkembang dalam manajemen modern. Dalam banyak kasus, keputusan manajerial sering kali didasarkan pada pertimbangan pragmatis dan efisiensi, yang kadang mengabaikan aspek moral dan spiritual. Hal ini dapat menyebabkan penurunan integritas dan akuntabilitas dalam organisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi integratif yang menggabungkan nilai-nilai etika dengan praktik manajerial kontemporer. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui pendidikan nilai dan pelatihan kepemimpinan spiritual (Hamka et al., 2022). Melalui program-program ini, individu dalam organisasi dapat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Selain itu, rekonstruksi paradigma etika organisasi juga diperlukan untuk

menciptakan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan.

Dalam menghadapi era postmodern yang penuh dengan kompleksitas dan dinamika, pemikiran Hamka mengenai tasawuf dan spiritualitas dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun kepemimpinan yang beretika. Menurut kajian, daya tarik pemikiran Hamka terletak pada kemampuannya dalam memahami keadaan masyarakat dan kebutuhan mereka berdasarkan agama, teori sosial, dan filsafat, yang sangat relevan dalam konteks modern. Integrasi pemikiran Buya Hamka dalam etika manajerial kontemporer tidak hanya memberikan perspektif moral dan spiritual dalam kepemimpinan, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia manajerial modern. Penerapan nilai-nilai akhlak, integritas, dan pengabdian dalam praktik manajerial dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan berkeadilan.

Sebagai langkah awal, organisasi dapat mulai dengan mengidentifikasi dan mengadopsi nilai-nilai utama dalam pemikiran Hamka yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, melalui pelatihan dan pendidikan internal, nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan dalam budaya organisasi dan diterapkan dalam setiap aspek operasional. Dengan komitmen dan konsistensi, integrasi pemikiran Hamka dapat mewujudkan kepemimpinan yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual. Pemikiran Buya Hamka mengenai etika manajerial kontemporer menawarkan pendekatan yang holistik dan integratif dalam membangun kepemimpinan yang beretika. Melalui penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik manajerial, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pemikiran Hamka tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam konteks manajerial modern yang menuntut integritas dan etika dalam setiap aspek kehidupan.

Kontribusi Teoretis terhadap Ilmu Kepemimpinan Islam

Pemikiran Buya Hamka mengenai kepemimpinan Islam menawarkan kontribusi signifikan dalam membentuk model kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam konteks modern, integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan praktik manajerial kontemporer menjadi krusial untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dan beretika. Hamka menekankan pentingnya akhlak dan spiritualitas sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan, yang sejalan dengan konsep kepemimpinan Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat (Arawan et al., 2025). Rekonstruksi model kepemimpinan Islam berbasis pemikiran Buya Hamka mencakup tiga elemen pokok: spiritualitas, moral, dan sosial. Spiritualitas dalam kepemimpinan menekankan hubungan yang kuat antara pemimpin dan Tuhan, yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Akhlak sebagai landasan moral memastikan bahwa setiap tindakan pemimpin didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan (Susanti et al., 2024).

Konsep moral dalam kepemimpinan Islam menurut Hamka berarti kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi

tekanan atau risiko. Ini mencerminkan integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, kebijakan sosial menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempromosikan keadilan. Pemikiran Buya Hamka juga memberikan kontribusi terhadap wacana etika organisasi dan manajemen. Dalam dunia bisnis yang sering kali didominasi oleh orientasi keuntungan, pendekatan etika Islam yang diajukan oleh Hamka menawarkan alternatif paradigma manajerial yang menekankan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis.

Dalam konteks ini, pemikiran Hamka dapat memperkuat basis etik dan religius dalam praktik manajemen. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam strategi dan operasi organisasi, pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang lebih beretika dan berkelanjutan (Susanti et al., 2024). Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan serta memperkuat reputasi organisasi di mata publik. Untuk pengembangan kepemimpinan Islami di era modern, pendidikan pemimpin berbasis nilai Islam menjadi sangat penting. Program pelatihan kepemimpinan harus mencakup studi tentang etika Islam, spiritualitas, dan prinsip-prinsip manajerial yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini akan membekali calon pemimpin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan integritas dan tanggung jawab.

Integrasi kurikulum kepemimpinan Islami dalam organisasi keumatan juga dapat memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Pemimpin yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Ini akan berdampak positif pada kualitas kepemimpinan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi sosial (Arawan et al., 2025). Penerapan model kepemimpinan Islam berbasis pemikiran Buya Hamka juga dapat membantu mengatasi tantangan etika dalam organisasi modern. Dengan menekankan pentingnya akhlak dan spiritualitas, pemimpin dapat menghindari praktik-praktik tidak etis seperti korupsi, diskriminasi, dan eksplorasi. Ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Selain itu, pendekatan kepemimpinan yang diajukan oleh Hamka dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Ini akan meningkatkan kinerja organisasi dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pemikiran Buya Hamka juga relevan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dalam menghadapi tantangan global, pemimpin perlu memiliki pandangan yang luas dan kemampuan untuk beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Pendekatan Hamka yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pemikiran modern dapat menjadi panduan dalam menghadapi dinamika global. Dalam dunia bisnis internasional, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dapat meningkatkan daya saing organisasi. Dengan menekankan etika dan tanggung jawab sosial, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat dan menarik minat pelanggan serta investor yang menghargai nilai-nilai tersebut. Ini akan memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar global.

Etika Kepemimpinan Islami dalam Konteks Sosial dan Pemerintahan Aceh

Etika kepemimpinan Islami memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk pola kepemimpinan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Aceh, prinsip-prinsip kepemimpinan Islami memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat daerah ini menerapkan sistem pemerintahan berbasis Syariat Islam yang unik di Indonesia. Nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan sosial dan hukum di Aceh menjadi fondasi utama dalam mengembangkan model kepemimpinan yang bukan hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan juga pada pengabdian dan tanggung jawab moral. Pemikiran Buya Hamka tentang pentingnya akhlak dan spiritualitas dalam kepemimpinan menjadi sangat relevan untuk memperkuat sistem etika dalam birokrasi dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Buya Hamka menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan semata-mata posisi atau jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi di hadapan Allah dan manusia. Pandangan ini memiliki kesamaan mendasar dengan filosofi kepemimpinan Aceh yang dikenal dengan konsep *"adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala"*, yang berarti adat dipegang oleh pemimpin adat, sementara hukum diatur oleh ulama. Konsep ini mencerminkan hubungan sinergis antara kekuasaan dan moralitas, antara politik dan agama, yang menjadi ciri khas kepemimpinan Aceh sejak masa kesultanan (Khalsiah et al., 2018). Dalam konteks ini, etika kepemimpinan ala Hamka yang berlandaskan pada akhlak mulia dapat menjadi panduan bagi para pemimpin Aceh dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur, amanah, dan penuh rasa tanggung jawab sosial.

Dalam tataran pemerintahan modern, etika kepemimpinan Islami dapat diterjemahkan dalam bentuk integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Aceh, sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan otonomi khusus berbasis Syariat Islam, memiliki peluang besar untuk menjadi model kepemimpinan beretika di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Seiring dengan perkembangan politik dan ekonomi, muncul kecenderungan pragmatisme dan kepentingan pribadi yang terkadang mengaburkan nilai-nilai keislaman dalam birokrasi. Dalam konteks inilah pemikiran Buya Hamka tentang pentingnya menegakkan moralitas dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan publik menemukan relevansinya yang mendalam.

Hamka menekankan bahwa seorang pemimpin sejati harus meneladani sifat Rasulullah SAW yang *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*. Empat karakter utama ini bukan sekadar simbol moral, tetapi merupakan prinsip etika yang dapat membentuk integritas seorang pemimpin dalam menjalankan amanah. Dalam konteks pemerintahan Aceh, prinsip *shiddiq* berarti kejujuran dalam menyampaikan informasi dan kebijakan publik; *amanah* berarti tanggung jawab terhadap kepercayaan rakyat; *tabligh* berarti keterbukaan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat; dan *fathanah* mencerminkan kecerdasan strategis dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama. Implementasi nilai-nilai ini menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan.

Lebih jauh, pemikiran Buya Hamka juga menekankan bahwa etika kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritualitas. Kepemimpinan

yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual akan melahirkan kebijakan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di Aceh, nilai spiritualitas ini dapat diinternalisasi dalam mekanisme pengambilan keputusan birokratis, baik di tingkat pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Seorang pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual akan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak semata-mata bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga bernali moral dan sosial (Salsabilla et al., 2024).

Dalam konteks sosial, masyarakat Aceh memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat dan kolektif. Nilai-nilai Islam bukan hanya menjadi ajaran normatif, tetapi telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas sosial mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan di Aceh tidak hanya dituntut untuk efektif secara administratif, tetapi juga harus mampu menjaga harmoni sosial dan moralitas masyarakat. Pemikiran Hamka tentang pentingnya pendidikan akhlak dan keteladanan moral dapat menjadi panduan bagi para pemimpin lokal dalam membangun komunikasi yang santun, membina masyarakat dengan kasih sayang, dan menghindari perilaku otoriter. Dalam pandangan Hamka, kepemimpinan yang sejati bukanlah yang ditakuti, tetapi yang dicintai karena ketulusannya dalam melayani.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi etika kepemimpinan Islami di Aceh adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai sekuler ke dalam ruang publik. Nilai pragmatisme, materialisme, dan individualisme sering kali berseberangan dengan semangat pengabdian dan keikhlasan yang diajarkan dalam Islam (Melinda et al., 2024). Dalam hal ini, relevansi pemikiran Hamka menjadi sangat kuat, karena beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kemajuan materi dan ketenangan batin. Pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan ini akan menjadi teladan bagi masyarakat Aceh dalam menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri keislaman.

Dalam bidang pendidikan dan lembaga sosial di Aceh, penerapan etika kepemimpinan Islami dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai moral dalam sistem manajerial. Para kepala sekolah, rektor, dan pimpinan lembaga keagamaan diharapkan tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pembimbing moral bagi bawahannya. Hal ini sesuai dengan gagasan Hamka bahwa pendidikan moral harus dimulai dari keteladanan, bukan sekadar dari pengajaran teori. Pemimpin yang menegakkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam keseharian akan menjadi contoh nyata bagi generasi muda Aceh untuk tumbuh dalam integritas dan akhlak mulia.

Dalam ranah pemerintahan, penerapan etika manajerial Islami ala Hamka dapat memperkuat konsep *good governance* berbasis Syariat Islam. Pemerintahan Aceh yang berlandaskan Syariat semestinya tidak hanya mengatur hukum pidana atau ibadah, tetapi juga membangun sistem birokrasi yang bersih dan melayani. Prinsip-prinsip seperti *ihsan* (berbuat baik), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab) harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik (Zainal & Jasman J, 2022). Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi dalam struktur pemerintahan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan meningkat, dan keadilan sosial dapat terwujud.

Etika kepemimpinan Islami juga dapat berperan penting dalam mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan di Aceh. Buya Hamka mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang menghancurkan jiwa bangsa. Pemimpin yang korup telah kehilangan nilai spiritualnya karena lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada amanah publik. Dengan demikian, internalisasi nilai spiritualitas dan akhlak dalam sistem pemerintahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Selain itu, dalam konteks sosial-keagamaan, etika kepemimpinan Islami juga menuntut pemimpin Aceh untuk menjadi perekat sosial di tengah keberagaman. Meskipun masyarakat Aceh mayoritas Muslim, namun pluralitas etnis, adat, dan pandangan politik tetap ada. Pemimpin yang beretika harus mampu mengelola perbedaan dengan bijak dan mengedepankan prinsip musyawarah, sebagaimana ditekankan oleh Hamka bahwa musyawarah adalah cermin kepemimpinan yang menghargai partisipasi dan keadilan sosial. Dengan semangat ini, pemimpin dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun harmoni antar kelompok masyarakat.

Kesimpulan

Pemikiran Buya Hamka memiliki signifikansi yang kuat dalam membangun fondasi etika kepemimpinan yang bermoral dan transformatif. Gagasan-gagasan beliau, yang berakar pada spiritualitas, akhlak, moral, dan komitmen sosial, menawarkan paradigma alternatif yang mampu merespons tantangan kepemimpinan modern yang kerap terjebak dalam sekularisme pragmatis dan relativisme nilai. Dalam konteks manajerial kontemporer, prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkaya diskursus etika organisasi, tetapi juga menyediakan kerangka normatif yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, hubungan antarpersonal, dan pengelolaan organisasi secara menyeluruh.

Kajian ini menunjukkan bahwa sintesis nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen modern melalui pemikiran Buya Hamka bukan sekadar ideal normatif, tetapi dapat menjadi acuan strategis dalam menciptakan model kepemimpinan yang holistik dan manusiawi. Kepemimpinan berbasis nilai religius seperti yang dicontohkan Buya Hamka mampu memberikan orientasi moral yang kuat dalam struktur organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif. Hal ini memberikan peluang besar bagi organisasi, baik publik maupun privat, untuk mengintegrasikan prinsip etika Islam ke dalam sistem manajemen tanpa kehilangan relevansi kontekstual.

Referensi

- Ahmad, A. (2016). Konsepsi Islam dalam merumuskan pemimpin dan kepemimpinan. *Jurnal Al-Ulum, Universitas Islam Madura*, 2(1), Article 1.
- Ansari, I., & Alzamzami, M. (2022). Moderasi agama perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-Baqarah: 256. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.11>

- Arawan, A., Zulbasri, H., Ansori, A., & Anwar, K. (2025). Konsep taujih wa tansiq dalam Islam: Implementasi dalam manajemen dan kepemimpinan. *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research*, 3(1), 404–410. <https://doi.org/10.69693/ijim.v3i1.320>
- Arifin, A. L., & Takrim, M. (2021). Integritas dan kepemimpinan milenial: Kasus pada HR leader. *Anterior Jurnal*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i3.2115>
- Checharia, N., & Pujianto, W. E. (2024). Peran kepemimpinan terhadap perubahan organisasi di Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen. *Masman: Master Manajemen*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i1.281>
- Fazillah, N. (2023). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>
- Gera, I. G., Ganjarjati, N. I., & Purbaningrum, D. (2024). Kepemimpinan pelayanan Robert K. Greenleaf sebagai model manajemen pendidikan yang efektif dan humanis. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.888>
- Hamka. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional.
- Hamka, M. B., Syam, A. R., & Ikhwan, A. (Ed.). (2022). *Pendidikan berbasis nilai-nilai profetik dalam pemikiran Buya Hamka*. Katalog Buku STAI Muhammadiyah Tulungagung, 1–91.
- Jiewen, X., Xiaoyang, L., & Ahmad, J. B. (2024). Authentic leadership; origins and foundations: A review of literature. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 13. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v13-i3/21881>
- Kamal, T. C., & Mulyana, A. (2019). Peranan Buya Hamka dalam gerakan pembaharuan Muhammadiyah tahun 1925–1966. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22152>
- Khalsiah, R., Candrasari, R., Fadhillah, N., Praza, R., & Desiariawati, N. (2018). An analysis of culture value in *Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara*. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 9(12), 1985–1889. <http://dx.doi.org/10.5958/0976-5506.2018.02265.9>
- Kim, H. D., & Cruz, A. B. (2022). Transformational leadership and psychological well-being of service-oriented staff: Hybrid data synthesis technique. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 8189. <https://doi.org/10.3390/ijerph19138189>
- Maulan, F., Ichsa, Y., Ramadhan, A. S., & Rubiyyati, M. F. (2021). Akhlak dalam perspektif Buya Hamka. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 6(2), Article 2.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prabowo, A. A., Mahendra, W. A. I., Roihan, A., Haikal, D., Khairi, M. A., Siregar, K. A., Awandano, C., Puspita, M., Zendrato, N. W., Salamah, O., & Harahap, S. (2025). Get to know the tafsir of the Nusantara in the 20th century: *Tafsir Al-Azhar* by Buya Hamka. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61166/values.v2i1.47>

- Putra, Z., & Maruf, J. J. (2022). Teuku Umar leadership as reflection of Islamic leadership. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i1.1834>
- Rahmawati, M., Bandarsyah, D., & Sulaeman, S. (2024). Kepemimpinan kerajaan sultanah dalam perubahan sosial di Aceh, 1641–1699. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 446–488. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i3.27237>
- Salsabilla, A., Daulay, N., & Farabi, M. A. (2024). Perspektif Buya Hamka tentang urgensi spiritual quotient (SQ) dalam pendidikan Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), Article 3. <https://doi.org/10.58230/27454312.980>
- Schmidt, R., & Dailey, K. (2024). Servant-leadership: Forgiving others in the restoration of community. *International Journal of Servant-Leadership*, 18(1). <https://doi.org/10.33972/ijsl.414>
- Srikandi, S. D., Halimatussadiyah, & Sari, E. (2021). Konsep kepemimpinan menurut pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Al-Dirayah*, 7(1). <https://drive.google.com/file/d/11rmFXMnADvYyPT3EHz9zPLGXAXxmVjVb/view>
- Sukatin, Astuti, A., Afiyah, Z., Ningsih, S., Pranata, A., & Jannah, R. T. (2022). Kepemimpinan dalam Islam. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>
- Susanti, F., Fitri, L., Wastri, L., & Demina. (2024). The concept of leadership in Islam: An analysis of Abuya Hamka's thoughts. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i2.17555>
- Thamrin, J. H., Bawa, D. L., Wulur, M. B., & Yasin, M. (2024). Pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam film *Buya Hamka* Vol. I karya Fajar Bustomi. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), Article 1.
- Usanto, U., Sucahyo, N., Warta, W., Khie, S., & Fitriyani, I. F. (2023). Transformasi kepemimpinan yang bersifat profetik dan pemberdayaan masyarakat di era Society 5.0 yang berkelanjutan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5287–5301. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16607>
- Vikasari, A. Y., Fauzi, A., Bahaf, A. M., Gunawan, A., & Priatna, S. (2023). Transformational leadership of madrasah principals in the implementation of the independent curriculum. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20891>
- Yugo, T., & Surana, D. (2024). Ihsan dalam tinjauan aksiologi filsafat Islam. *Tamadduna: Jurnal Peradaban*, 1–20. <https://doi.org/10.29313/tamadduna.v1i2.4833>
- Zhu, M., Zhang, W., & Xu, C. (2024). Ethical governance and implementation paths for global marine science data sharing. *Frontiers in Marine Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1421252>
- Zona, I. A. (2024). Kekuasaan politik menurut pemikiran Buya Hamka. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v5i1.19312>